



RLPPD 2019

LUMAJANG
EKSOTIK



RANU KLAKAH
Kecamatan Klakah

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I CAPAIAN KINERJA MAKRO	1
BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	18
A. URUSAN PENDIDIKAN	46
B. URUSAN KESEHATAN	158
C. URUSAN PEKERJAAN UMUM	171
D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	171
E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS	171
F. URUSAN SOSIAL	171
BAB III HASIL EKPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018	178
BAB IV REALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	185
BAB V INOVASI DAERAH TAHUN 2019	197
BAB VI PENUTUP	210



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin-Nya maka Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2019, dapat diselesaikan dengan baik.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Melalui penyusunan RLPPD, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipantau dan diketahui perkembangannya, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan. Selain itu, pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan selama satu tahun sebagai informasi kepada masyarakat sekaligus perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

Mudah-mudahan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019 ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lumajang, Maret 2020

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML



BAB I

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme – UNDP*). Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara IPM dan kemiskinan, terutama hubungan yang signifikan antara salah satu variabel IPM yaitu variabel daya beli dengan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Lumajang yang dihitung dengan metode baru selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 63,02 pada tahun 2015 menjadi 65,33 pada tahun 2019. IPM yang dibentuk dari tiga komponen indeks yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli ini mengalami peningkatan cukup berarti.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang Menurut
Komponen, 2015-2019

Komponen	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,27	69,38	69,50	69,70	69,94
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,61	11,77	11,78	11,79	11,80
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,04	6,05	6,20	6,21	6,22
Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Ribu Rupiah	7.921	8.311	8.503	8.931	9.274
IPM		63,02	63,74	64,23	64,83	65,33
Pertumbuhan IPM	%	1,11	1,15	0,77	0,93	0,5

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lumajang, 2019



Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Investasi dalam rangka pembangunan manusia hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya, tetapi akan baru terasa pada beberapa tahun kemudian. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah. Dari hasil penghitungan angka IPM se-Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam kabupaten/Kabupaten yang mempunyai IPM kategori rendah di tingkat Jawa Timur. Pada tahun 2019 peringkat IPM Kabupaten Lumajang menempati posisi ke 36 dari 38 kabupaten/Kabupaten yang ada di Jawa Timur.

Tabel 1.2
Angka IPM dan Peringkat IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019

Tahun	Angka IPM Kabupaten Lumajang	Angka IPM Jatim	Peringkat
2015	63,02	68,95	35
2016	63,74	69,74	35
2017	64,23	70,27	36
2018	64,83	70,77	36
2019	65,33	71,50	36

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lumajang, 2019

B. ANGKA KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap wilayah.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Di era tahun 1992 pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa berikutnya sampai dengan saat ini, penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai daerah untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Berbagai program diluncurkan untuk mengurangi beban hidup penduduk miskin dan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin yang merupakan target utama pemerintah, selain mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program-program pengentasan kemiskinan antara lain program beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin, Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan modal usaha dan sebagainya. Dalam menentukan penduduk miskin, metodologi kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Metode ini digunakan oleh sebagian besar negara berkembang sesuai dengan rekomendasi FAO dan WHO, Roma 2001. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). GK adalah jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membayar kehidupan layak minimal pendekatan kebutuhan pokok, makanan (setara 2.100 kkal per hari) dan non-makanan esensial (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dll).

Garis kemiskinan Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan antar waktu selama 2013-2018. Pada tahun 2013 garis kemiskinan Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 228.796,- dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 281.461 pada tahun 2018. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 sebanyak 124,4 ribu jiwa atau sekitar 12,14 persen. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 120,70 ribu jiwa atau 11,75 persen dari total penduduk Kabupaten Lumajang. Melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, penduduk miskin di Kabupaten Lumajang terus mengalami penurunan, sampai dengan tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 103,69 jiwa atau 9,98 persen.



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Tabel.1.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2013	124,4	12,14	1,17	0,18	228.796
2014	120,7	11,75	1,68	0,41	234.728
2015	118,51	11,52	1,65	0,41	245.806
2016	115,91	11,22	1,62	0,35	258.840
2017	112,65	10,87	1,60	0,37	267.366
2018	103,69	9,98	1,38	0,31	281.461

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lumajang, 2018

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index merupakan ukuran rata-rata 2 kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai P pada tahun 2013 sebesar 1,17 kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,68 pada tahun 2014. Pada tahun 2015-2018 nilai P1 mengalami penurunan 1,65; 1,62 ; 1,60 dan 1,38. Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di suatu wilayah. Nilai P2 pada tahun 2013 sebesar 0,18 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,41 pada tahun 2014.

Pada tahun 2016 nilai P2 kembali menurun menjadi 0,35 dan sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan P2 menjadi 0,37 dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 0,31.

C. ANGKA PENGANGGURAN

Hasil Sakernas tahun 2018 di Kabupaten Lumajang seperti terlihat pada tabel 1.9 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja (15 tahun keatas) tercatat ada



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

sebanyak 813.392 orang, yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 553.923 orang (68,10 persen) dan bukan angkatan kerja sebesar 259.469 orang (31,90 persen). Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut kegiatan utamanya adalah bekerja sebanyak 539.800 orang (66,36 persen).

Tabel : 1.4

Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke atas) Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lumajang Tahun 2018

Kegiatan Utama	Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
Angkatan Kerja	339.665	86,62	214.258	50,86	553.923	68,10
Bekerja	330.957	84,40	208.843	49,58	539.800	66,36
Pengangguran Pernah Kerja	1.089	0,28	1.286	0,31	2.375	0,29
Pengangguran Tidak Pernah Bekerja	7.619	1,94	4.129	0,98	11.748	1,44
Bukan Angkatan Kerja	52.464	13,38	207.005	49,14	259.469	31,90
Sekolah	23.539	6,0	20.863	4,95	44.402	5,46
Rumah Tangga	11.291	2,88	176.491	41,90	187.782	23,09
Lainnya	17.634	4,5	9.651	2,29	27.285	3,35
Jumlah Usia Kerja	392.129	100	421.263	100	813.392	100

Sumber : Sakernas 2018

Bila dilihat dari jenis kelamin penduduk usia kerja, angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan. Angkatan kerja laki-laki sebanyak 86,62 persen dari penduduk usia kerja laki dan angkatan kerja perempuan hanya 50,86 persen dari penduduk usia kerja perempuan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia kerja laki-laki lebih berpotensi untuk bekerja dibanding dengan penduduk perempuannya. Sebaliknya untuk penduduk usia kerja perempuan yang termasuk bukan angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Kegiatan utama seminggu yang lalu untuk penduduk usia kerja laki-laki sebagian besar adalah bekerja sebanyak 84,40 persen sementara penduduk usia kerja perempuan yang bekerja sebanyak 49,58 persen dan 41,90 persen mengurus rumah tangga.

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (Labour Supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam



suatu perekonomian. Berdasarkan tabel berikut nilai TPAK Kabupaten Lumajang selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, 66,75 persen di tahun 2015, menurun pada tahun 2017 menjadi 63,78 persen selanjutnya meningkat pada tahun 2019 sebesar 65,92 persen.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Seseorang dikatakan bekerja apabila berupaya bekerja atau berusaha membantu mencari nafkah sekurang-kurangnya satu jam dalam sehari secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Sementara dikatakan sebagai pencari kerja apabila melakukan kegiatan mencari pekerjaan. Istilah lain dari pencari kerja adalah pengangguran, yang bisa terdiri atas pencari kerja baru atau pernah bekerja sebelumnya.

Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional.

Tabel 1.5
Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Lumajang
Tahun 2017-2019

Tahun	2017	2018	2019
Angkatan Kerja (jiwa)	515.516	553.923	*
TPAK (%)	63,78	68,10	65,92
TPT (%)	2,91	2,55	2,81
TKK (%)	97,09	97,45	*

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka Untuk Perencanaan Pembangunan, BPS 2020

*) Belum ada data



3) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

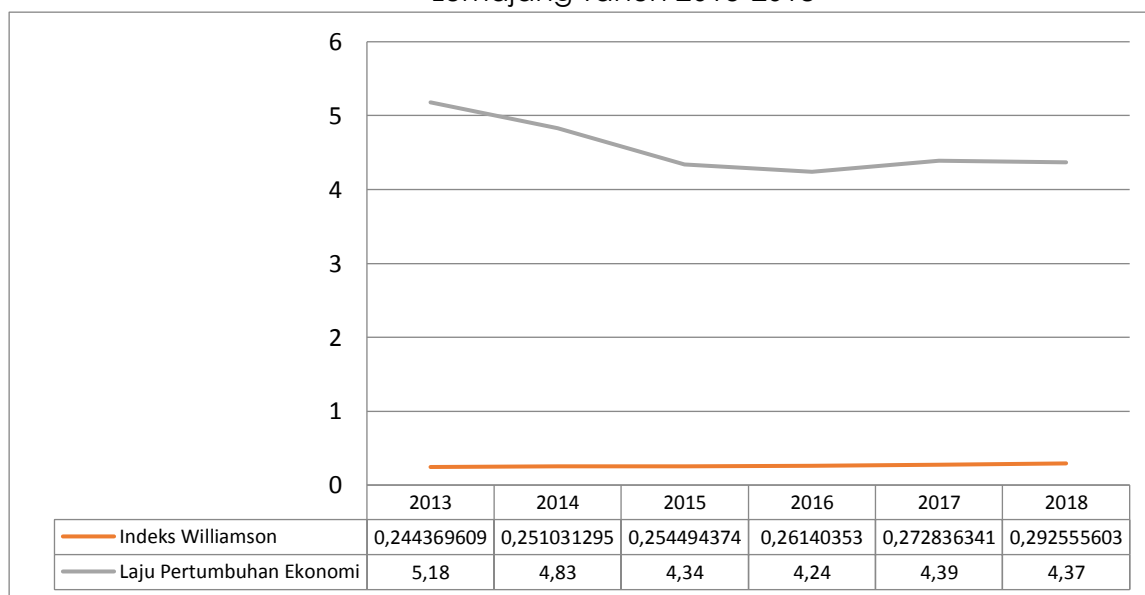
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Antara TPT dan TKK akan selalu berkaitan satu sama lain. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang, dan sebaliknya jika TKK besar berarti TPT akan berkurang atau semakin kecil.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 mencapai 515.516 orang, kemudian meningkat menjadi 553.923 orang pada tahun 2018. Jumlah angkatan kerja yang meningkat dalam kurun waktu 2 tahun tersebut searah dengan angka TPAK, tahun 2017 sebesar 63,78 persen, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 68,10 persen. Angka TPAK yang menurun seiring dengan nilai TPT Kabupaten Lumajang yang juga mengalami penurunan. Nilai TPT di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 2,91 persen, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2018 yang angkanya sebesar 2,55 persen. Dengan TPT sebesar 2,55 persen pada tahun 2018, artinya TKK pada saat itu sebesar 97,45 persen.

D. PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut data BPS dapat dilihat dari grafik berikut :

Tabel 1.6
Perbandingan Indeks Williamson dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2018



Sumber : Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Lumajang Tahun 2019

Apabila dilihat dari tabel diatas dapat diartikan bahwa setiap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang menurun, tingkat ketimpangan dan disparitas



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

wilayah mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2016 terjadi perbedaan, laju pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut meningkat, tetapi tingkat ketimpangan juga meningkat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan di rentang tahun 2013-2018 Kabupaten Lumajang nilai indeks Williamson sebesar 0,262781792 ($<0,5$) yang artinya Kabupaten Lumajang tidak terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi

E. PENDAPATAN PER KAPITA

Besar Angka Pendapatan per kapita Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.1.7
Pendapatan Perkapita Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2019

	2017	2018	2019
Pendapatan Perkapita Harga Berlaku (juta Rp)	27.615.947,06	29.521.199,47	31.381.002,88

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka Unuk Perencanaan Pembangunan, BPS,2020

Besar pendapatan perkapita Kabupaten Lumajang mengalami kecenderungan meningkat, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun dari Atas Dasar Harga Konstan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan penduduk mengalami peningkatan, walaupun di pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang mengalami penurunan.

F. KETIMPANGAN PENDAPATAN (RATIO GINI)

Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Pada tahun 2017 Indeks Gini mencapai angka 0,31, yang menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan pada tahun 2018 mencapai 0,30 dengan tingkat ketimpangan rendah

Tabel 1.8
Indeks Gini Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2018

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gini Ratio	Lumajang	0,23	0,23	0,29	0,35	0,31	0,30
	Jawa Timur	0,36	0,37	0,42	0,40	0,42	0,37

Sumber : Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Lumajang Tahun 2019



BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lumajang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pendidikan dasar;
- b. Pendidikan kesetaraan;
- c. Pendidikan anak usia dini.

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan
			%	Tahun	Rp.
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	2019	4.685.547.650,00
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2019	286.110.000,00
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	2019	1.077.615.000,00



3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Kab.	Capaian SPM 2019
			%	%
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	91,23
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	0,39
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	136,42

Pencapaian SPM di Bidang Pendidikan pada Tahun 2018 tidak dimunculkan sebagai pembandingan capaian SPM Tahun 2019, karena indikator SPM mengalami perubahan, yakni Tahun 2018 terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang dijabarkan dalam 27 Indikator SPM, sedangkan untuk Tahun 2019 SPM yang diampu oleh Kabupaten adalah 3 (tiga) pelayanan dasar dengan 3 indikator capaian SPM. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4. Dukungan Personil

Status Kepegawaian

- Pegawai negeri sipil (PNS) : 52 orang
- Tenaga kontrak : 43 Orang

Latar belakang pendidikan PNS

- Magister (S2) : 15 orang
- Sarjana (S1) : 18 orang
- Sarjana muda/Diploma III (D3) : 1 orang
- Sarjana muda/Diploma II (D2) : - orang
- Sarjana muda/Diploma I (D1) : 1 orang
- SLTA : 17 orang
- SLTP : 2 orang
- SD : 1 orang

Pangkat dan golongan

- Pembina Utama (IV/d) 1



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	11 orang
- Pembina Tingkat I (IV/b)	:	4 orang
- Pembina (IV/a)	:	3 orang
- Penata Tingkat I (III/d)	:	8 orang
- Penata Tingkat I (III/c)	:	3 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	4 orang
- Penata Muda (III/a)	:	1 orang
- Pengatur Tingkat I (II/d)	:	4 orang
- Pengatur (II/c)	:	4 orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	6 orang
- Pengatur Muda (II/a)	:	1 orang
- Juru Tingkat I (I/d)	:	2 orang
- Juru (I/c)	:	- orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	- orang
- Juru Muda (I/a)	:	- orang
Pejabat struktural dan fungsional		
- Struktural (Eselon II, III dan IV)	:	20 orang
- Fungsional Pengawas	:	4100 orang

5. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Dari sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan masih memiliki permasalahan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Pada Program dan Kegiatan di Dinas Pendidikan, masih terjadi lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pada kegiatan di beberapa Bidang, dimana masih ada beberapa kegiatan yang masih belum terserap optimal;
2. Pada penyerapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena penyerahan anggaran dari Provinsi pada bulan Maret 2019 kemudian pada Pemerintah Kabupaten perlu penyesuaian seperti aplikasi Sistem Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka sebagian laporan pertanggungjawaban dari sekolah ke Dinas Pendidikan mengalami keterlambatan atau dengan kata lain laporan triwulan dari lembaga sekolah menumpuk pada akhir Desember 2019;



3. Selanjutnya untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) terjadi penurunan disebabkan data peserta didik untuk MI dan MTs dari Kemenag masih belum valid sehingga penyebut dalam perhitungan APK menjadi kecil / tidak lengkap. Diharapkan ketika data peserta didik dari Kemenag sudah tersaji, maka persentase APK SD/MI dan SMP/MTs dapat lebih besar dari tahun 2018.
4. Rendahnya Angka Rata Rata Lama Sekolah, dikarenakan masih banyak masyarakat Lumajang diatas umur 25 tahun yang masih belum menamatkan pendidikan pada jenjang SMP. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat lumajang memiliki angka rata rata lama sekolah, mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan.

B. Solusi

1. Dengan mempersiapkan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan yang lebih baik;
2. Pembinaan yang berlanjut dan pengevaluasian aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (SIP BOS) mulai anggaran 2019 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dengan cara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penatausahaan BOS. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan monitoring hasil sosialisasi dan Bimtek ke lembaga sekolah penerima BOS baik negeri atau swasta,
3. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi data antara Kemendikbud dengan Kemenag untuk dapat memberikan data pendidikan dengan akurat dan tepat waktu. Sedangkan mengenai partisipasi peserta didik, solusinya yaitu dengan memperbaiki berbagai fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan kegiatan bantuan lainnya sebagai daya tarik siswa untuk mau menempuh wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya juga memberikan motivasi kepada siswa beserta orangtuanya akan arti pentingnya menempuh pendidikan untuk masa depan kelak demi kesejahteraan hidupnya.



4. Mengajak masyarakat Lumajang khususnya yang berusia diatas 25 tahun yang masih belum menyelesaikan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah untuk melanjutkan kembali pendidikannya melalui program kesetaraan. Dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang mempunyai inovasi program GEMPITA DESA atau Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa yang diharapkan dapat menyerap peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya yang tertunda/terhenti sampai pada lingkup desa. Dengan adanya inovasi ini kami sangat berharap dapat meningkatkan angka rata rata lama sekolah sekaligus dapat meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Lumajang.

B. URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan, Dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 pasal 2 (dua) disebutkan bahwa Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

2. Target Pencapaian SPM



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	2019
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2019

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2018	Capaian SPM 2019
			%	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	94.42	95,87
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	102.00	103,31
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	101.38	101,51



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	92.17	89,27
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	99.69	95,32
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	51.47	79,44
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	68.81	79,91
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	35.58	50,48
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	26.41	101,81
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	65.38	101,36
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	92,28
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	13.70	41.16

4. Dukungan Personil

Status kepegawaian

Pegawai negeri sipil (PNS) : 717 orang

Tenaga kontrak : 716 orang

Latar belakang pendidikan (PNS dan Tenaga Kontrak)

Magister (S2) : 6 orang

Sarjana (S1) : 378 orang

Sarjana muda/Diploma III (D3) : 752 orang

Diploma 1 (D1) : 4 orang

SLTA : 260 orang

SLTP : 18 orang

SD : 15 orang



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Pangkat dan golongan (PNS)

- Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1 orang
- Pembina Tingkat I (IV/b)	:	4 orang
- Pembina (IV/a)	:	32 orang
- Penata Tingkat I (III/d)	:	148 orang
- Penata (III/c)	:	68 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	114 orang
- Penata Muda (III/a)	:	136 orang
- Pengatur Tingkat I (II/d)	:	55 orang
- Pengatur (II/c)	:	128 orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	16 orang
- Pengatur Muda (II/a)	:	7 orang
- Juru Tingkat I (I/d)	:	1 orang
- Juru (I/c)	:	6 orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b)	:	1 orang
- Juru Muda (I/a)	:	- orang

Pejabat struktural dan fungsional

Struktural (Eselon II, III dan IV)	:	20 orang
• Eselon II	:	1 orang
• Eselon III	:	4 orang
• Eselon IV	:	15 orang
Struktural yang Telah Diklat	:	18 orang
• Eselon II	:	0 orang
• Eselon III	:	3 orang
• Eselon IV	:	15 orang
Fungsional	:	1.070 Orang

Struktur Organisasi

Jumlah TU/Sekretariat	:	1 Sekretariat
Jumlah Sub. Bagian	:	3 Subbag
Jumlah Bidang	:	3 Bidang
Jumlah Sub Bid./Seksi	:	12 Seksi

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah Tenaga
1	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	33
2	Administrator Kesehatan	51
3	Epidemiologi Kesehatan	0
4	Pembimbing Kesehatan Kerja	1



5	Perawat	401
6	Perawat gigi	12
7	Bidan	327
8	Dokter	52
9	Dokter gigi	31
10	Apoteker	17
11	Asisten Apoteker	31
12	Nutrisionis	48
13	Pranata Laboratorium	26
14	Sanitarian	26
15	Perekam Medis	14
	TOTAL	1.070

5. Permasalahan dan Solusi

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil tidak mencapai target renja maupun target SPM.

Permasalahan :

a. masih ada ibu hamil yg tidak memeriksakan kehamilannya mulai usia kehamilan <12 minggu, karena masih ada mitos yg masih dipercaya bila memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan pada usia krhamilan terlalu kecil <12 minggu nanti kehamilannya hilang

Solusi :

- Memaksimalkan kegiatan kelas ibu hamil
- melaksanakan kegiatan kelas prakonsepsi agar pemahaman akan kehamilan benar dan mempersiapkan kehamilan yang sehat.
- kerjasama dgn Disdalduk KB PP dan kemenag dalam memaksimalkan kegiatan Suscatin dan Binwin. Agar pasangan pengantin tahu bagaimana mempersiapkan kehamilan yg sehat termasuk didalamnya periksa kehamilan ke tenaga kesehatan sedini mungkin (<12 minggu)

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sudah mencapai target renja dan SPM.



3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sudah mencapai target renja dan SPM.
4. Pelayanan Kesehatan Balita
Pelayanan kesehatan balita tidak mencapai target renja maupun target SPM

Permasalahan :

- a. Karena masih banyak balita yg masih belum lengkap mendapatkan pelayanan kesehatan antara lain imunisasi rutin masih belum lengkap diterima oleh semua balita khususnya imunisasi booster usia 18-24 bln.
- b. Masih belum semua balita dilakukan pemantauan perkembangan (SDIDTK) lengkap sesuai usianya.
- c. Masih belum semua balita sakit diperiksa dengan manajemen balita sakit (MTBS)

Solusi :

- a. Maksimalkan kegiatan posyandu dalam pelaksanaan pemantauan perkembangan (SDIDTK) pada balita sehat sesuai usianya. Dengan salah satu cara balita yg waktunya SDIDTK dihadirkan ke posyandu pada jam siang buka posyandu. Jadi ibu dan balita tidak menunggu lama.
 - b. melakukan MOU pelaksanaan SDIDTK dengan PAUD, TK, dan RA agar guru PAUD, TK, dan RA juga bisa melakukan pemantauan perkembangan pada balita usia PAUD dan TK.
 - c. meningkatkan skil petugas bidan, perawat dalam melaksanakan SDIDTK dengan mengadakan refres kegiatan SDIDTK.
 - d. Memaksimalkan pemeriksaan MTBS pada semua balita sakit yang datang ke faskes.
 - e. meningkatkan skil bidan, perawat dan dokter puskesmas dalam melakukan pemeriksaan MTBS
5. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tidak mencapai target renja maupun target SPM

Permasalahan :



- a. Target pelayanan kesehatan pada usia kesehatan dasar tidak bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya karena adanya jumlah sekolah yang melebihi kapasitas petugas sehingga tidak semua sekolah bisa dilakukan skrining, serta belum optimalnya tim UKS di puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan penjangkaran di sekolah

Solusi :

- a. Perencanaan kegiatan penjangkaran secara cermat
 - b. Melibatkan lintas program dalam pelaksanaan kegiatan penjangkaran di sekolah
 - c. Pembentukan tim pelaksana UKS (lebih dari 1 tim) sehingga bisa berbagi ke beberapa sekolah
6. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
- Pelayanan kesehatan usia produktif tidak mencapai target renja maupun target SPM 100 %.

Permasalahan :

- a. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait program PTM;
 - Puskesmas pandu PTM
 - Portal web
- b. Kurangnya pemantapan peran fasilitas pelayanan kesehatan
- c. Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrining usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.
- d. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu masih kurang
- e. Dukungan dan peran lintas sector masih kurang
- f. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu PTM
- g. Belum semua instansi/lembaga/organisasi/perkumpulan /komunitas dan lain-lain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM
- h. Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu belum dilatih
- i. Sarana prasarana untuk kegiatan posbindu tidak terfasilitasi
- j. Belum ada pelatihan teknis kegiatan konseling baik bagi kader maupun bagi tenaga kesehatan



- k. Belum ada media konseling PTM posbindu
- l. belum ada pelatihan survailans factor risiko PTM berbasis web

Solusi :

- a. Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan
- c. Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan
 - ✓ Jumlah petugas yang berperan di puskesmas hanya pengelola program PTM, Kualitas/pengetahuan juga masih perlu selalu ditingkatkan. Diharapkan pengelola program tidak melaksanakan tugas rangkap dan tidak segera dimutasi atau diganti ke program yang lain.
 - ✓ Di Dinas Kesehatan diperlukan sekitar 6 programer untuk PTM, Posbindu, kesehatan gilut, kesehatan indra, disabilitas dan gapti, agar bisa melaksanakan upaya pengendalian PTM dengan optimal. Sementara ini masih ada 2 (dua) tenaga pengelola program di tingkat kabupaten
 - ✓ Peningkatan kapasitas kader;
 - Jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan atau pembinaan secara intensif
 - Kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya pengendalian PTM
- d. Penguatan anggaran
- e. Peningkatan peran lintas program lintas sektor

7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan usia lanjut tidak mencapai target renja maupun target SPM

Permasalahan :

- a. Sarana Prasarana terkait pelayanan kesehatan (Pemeriksaan Kolestrol) yang masih kurang
- b. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat (Lansia) di wilayah yang masih kurang peduli terhadap kesehatannya

Solusi :



- a. Edukasi dan promosi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan
 - b. Optimalisasi dan konsistensi RR (Report and Recording) pelayanan lansia oleh jejaring puskesmas
 - c. Advokasi ke pemerintah dalam optimalisasi Posyandu Lansia
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi tidak mencapai target renja maupun target SPM 100 %.

Permasalahan :

- a. Kurangnya pengetahuan SDM kesehatan terkait program PTM;
 - Puskesmas pandu PTM
 - Portal web
 - Penanganan klinis Hipertensi
- b. Kurangnya pemantapan peran fasilitas pelayanan kesehatan
- c. Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrining usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.
- d. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu masih kurang
- e. Dukungan dan peran lintas sector masih kurang
- f. Belum semua desa mendapatkan sosialisasi tentang Posbindu PTM
- g. Belum semua instansi/lembaga/organisasi/perkumpulan /komunitas dan lain-lain mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang posbindu PTM
- h. Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu belum dilatih
- i. Sarana prasarana untuk kegiatan posbindu tidak terfasilitasi
- j. Belum ada pelatihan teknis kegiatan konseling baik bagi kader maupun bagi tenaga kesehatan
- k. Belum ada media konseling PTM posbindu
- l. belum ada pelatihan survailans factor risiko PTM berbasis web

Solusi :

- a. Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan



c. Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan

- ✓ Jumlah petugas yang berperan di puskesmas hanya pengelola program PTM, Kualitas/pengetahuan juga masih perlu selalu ditingkatkan. Diharapkan pengelola program tidak melaksanakan tugas rangkap dan tidak segera dimutasi atau diganti ke program yang lain.
- ✓ Di Dinas Kesehatan diperlukan sekitar 6 prografer untuk PTM, Posbindu, kesehatan gilut, kesehatan indra, disabilitas dan gapti, agar bisa melaksanakan upaya pengendalian PTM dengan optimal. Sementara ini masih ada 2 (dua) tenaga pengelola program di tingkat kabupaten
- ✓ Peningkatan kapasitas kader;
 - Jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan atau pembinaan secara intensif
 - Kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya pengendalian PTM

d. Penguatan anggaran

e. Peningkatan peran lintas program lintas sektor

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sudah mencapai target renja dan SPM.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sudah mencapai target renja dan SPM.

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB

Pelayanan kesehatan orang dengan TB tidak mencapai target renja maupun target SPM 100 %.

Permasalahan

- a. Kurangnya pencarian aktif oleh pustu dan poskesdes ke masyarakat
- b. Kurangnya pemeriksaan kontak pasien TBC oleh tenaga kesehatan

Solusi

- a. Supervisi fasilitatif pada layanan yang terkendala



- b. Koordinasi dengan pengelola program tingkat provinsi untuk bimtek kemampuan komunikatif Petugas dalam menggali faktor resiko
 - c. Koordinasi untuk refresh materi pelaporan SIHA pada faskes
 - d. Penguatan koordinasi lintas sektor untuk penjangkauan populasi kunci
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tidak mencapai target renja maupun target SPM 100 %.

Permasalahan

- a. Belum semua faskes melaporkan capaian kegiatan testing hiv melalui aplikasi SIHA, penyebab keterbatasan SDM dan sarpras elektronik
- b. Kemampuan Petugas dalam menggali faktor resiko hiv pasien yang terbatas
- c. Penjangkauan pada populasi kunci hiv yang terbatas karena keterbatasan koordinasi lintas sektor

Solusi

- a. Supervisi fasilitatif pada layanan yang terkendala
- b. Koordinasi dengan pengelola program tingkat provinsi untuk bimtek kemampuan komunikatif Petugas dalam menggali faktor resiko
- c. Koordinasi untuk refresh materi pelaporan SIHA pada faskes
- d. Penguatan koordinasi lintas sektor untuk penjangkauan populasi kunci.

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pengolahan air limbah domestik



2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2019
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	2019

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2018	Capaian SPM 2019
			%	%
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	74,59	74,94
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		65,68

4. Dukungan Personil

Status kepegawaian

Pegawai negeri sipil (PNS)	140 orang
Tenaga kontrak	156 orang

Latar belakang pendidikan

Magister (S2)	2 orang
Sarjana (S1)	30 orang
Sarjana muda/Diploma III (D3)	2 orang
SLTA	36 orang
SLTP	36 orang
SD	27 orang

Pangkat dan golongan

- Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
- Pembina Tingkat I (IV/b)	2 orang
- Pembina (IV/a)	- orang



- Penata Tingkat I (III/d)	3 orang
- Penata (III/c)	9 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b)	4 orang
- Penata Muda (III/a)	19 orang
- Pengatur Tingkat I (II/d)	22 orang
- Pengatur (II/c)	5 orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	17 orang
- Pengatur Muda (II/a)	5 orang
- Juru Tingkat I (I/d)	40 orang
- Juru (I/c)	6 orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b)	- orang
- Juru Muda (I/a)	- orang

Pejabat struktural dan fungsional

Struktural (Eselon II, III dan IV)	16 orang
Fungsional	- orang

5. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Terjadinya kerusakan jalan dan jembatan diakibatkan oleh penggunaan atau pemakaian jalan dan jembatan yang tidak sesuai dengan kemampuannya.
2. Bahu dan drainase jalan yang tidak terawat dengan baik sehingga jalan tergenang oleh air yang menyebabkan pengurangan umur rencana.
3. Penumpukan sedimen dalam bangunan dan saluran irigasi yang menyebabkan pengurangan kapasitas dalam bangunan dan saluran irigasi sehingga dapat menyebabkan bangunan dan saluran irigasi menjadi rawan banjir dan rawan kekeringan.
4. Banyaknya kehilangan pintu-pintu air pada jaringan irigasi sehingga menyulitkan pengaturan dan pengoperasian ke petak-petak sawah serta adanya endapan sedimen di saluran sehingga mudah terjadi banjir.
5. Pengurangan anggaran secara mandiri sebagai akibat perhitungan SILPA APBD Kabupaten Lumajang sangat berdampak pada capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang



dalam pelayanan infrastruktur kepada masyarakat. Karena dengan pengurangan anggaran berarti infrastruktur yang terbangun akan mengalami pengurangan secara kuantitas.

B. Solusi

1. Solusi yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak dan instansi terkait untuk menertibkan penggunaan jalan sesuai dengan kelas jalan yang telah ditentukan.
2. Solusi yang dilakukan dengan membenahi bahu jalan dan membangun saluran drainase yang baik, sosialisasi tentang pemeliharaan jalan supaya masyarakat tidak menutup saluran drainase dan menimbun bahu jalan sehingga jalan tidak tergenang oleh air sehingga umur rencana tetap terjaga.
3. Solusi yang dilakukan dengan melakukan normalisasi bangunan dan saluran irigasi terjadi peningkatan kapasitas bangunan dan saluran irigasi dalam penanggulangan daerah rawan banjir dan kekeringan.
4. Solusinya yang harus dilakukan guna pencegahan dan penanggulangan kehilangan pintu-pintu air yakni dengan membungkus/selimut beton cor pada kerangkanya.
5. Memberikan prioritas penganggaran, terutama pada pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam peraturan terbaru yakni Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	2019
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	2019

3. Realisasi Pencapaian SPM

**Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Menteri Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 22/PERMEN/M/2008**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2018	Capaian SPM 2019
			%	%
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	91,55	81,97
		2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	96,31	92,43
2.	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2,4	53,28

E. Dukungan Personil

Status kepegawaian

Pegawai negeri sipil (PNS)	23 orang
Tenaga kontrak	47 Orang



Latar belakang pendidikan

- Magister (S2)	3 orang
- Sarjana (S1)	8 orang
- Sarjana muda/Diploma III (D3)	- orang
- SLTA	11 orang
- SLTP	1 orang
- SD	- orang

Pangkat dan golongan

- Pembina Utama Muda (IV/c)	- orang
- Pembina Tingkat I (IV/b)	- orang
- Pembina (IV/a)	1 orang
- Penata Tingkat I (III/d)	5 orang
- Penata (III/c)	4 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b)	1 orang
- Penata Muda (III/a)	1 orang
- Pengatur Tingkat I (II/d)	1 orang
- Pengatur (II/c)	5 orang
- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	- orang
- Pengatur Muda (II/a)	1 orang
- Juru Tingkat I (I/d)	- orang
- Juru (I/c)	1 orang
- Juru Muda Tingkat I (I/b)	- orang
- Juru Muda (I/a)	- orang

Pejabat struktural dan fungsional

Struktural (Eselon II, III dan IV)	10 orang
Fungsional	- orang

4. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Masih kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk mendukung operasional dan kelancaran program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
2. Masih adanya Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang asetnya belum diserahkan ke pihak Pemerintah Kabupaten.



3. Minimnya Anggaran mengakibatkan Program dan Kegiatan tidak maksimalnya
4. Kurangnya personil Tenaga Ahli / Teknis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

B. Solusi

1. Solusinya adalah dengan secara bertahap melakukan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana Dinas sesuai kemampuan anggaran
2. Solusinya adalah melakukan monitoring terhadap Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang asetnya belum diserahkan ke pihak Pemerintah Kabupaten.
3. Mengoptimalkan PAD yang menjadi kewenangan DPKP
4. Melaksanakan peningkatan kapasitas kompetensi SDM DPKP

F. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
- e) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	2019
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	2019



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	2019
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	2019
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	2019

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2019
			%/orang
1.	Pelayanan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	21.781
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.580
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	9
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	94,59 %

4. Dukungan Personil

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	48	Orang
	Tenaga kontrak	180	Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	2	Orang
	Sarjana (S1)	6	Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	-	Orang
	Sarjana muda/Diploma II (D2)	-	Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	-	Orang
	SLTA	203	Orang



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Pangkat dan Golongan	SLTP	12	Orang
	SD	4	Orang
	Golongan I	5	Orang
	Golongan II	27	Orang
Pejabat Struktural dan Fungsional	Golongan III	13	Orang
	Golongan IV	48	Orang
	Struktural Eselon IIb	-	Orang
	Struktural Eselon IIIa	1	Orang
	Struktural Eselon IIIb	3	Orang
	Struktural Eselon IVa	7	Orang
	Fungsional	-	Orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2019

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	25	Orang	
	Tenaga kontrak	15	Orang	
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	2	Orang	
	Sarjana (S1)	17	Orang	
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	-	Orang	
	Sarjana muda/Diploma II (D2)	2	Orang	
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	1	Orang	
Pangkat dan Golongan	SLTA	16	Orang	
	SLTP	1	Orang	
	SD	1	Orang	
	Golongan I	1	Orang	
	Golongan II	10	Orang	
	Golongan III	9	Orang	
	Golongan IV	5	Orang	
	Pejabat Struktural dan Fungsional	Struktural Eselon IIb	1	Orang
		Struktural Eselon IIIa	1	Orang
		Struktural Eselon IIIb	3	Orang
Struktural Eselon IVa		7	Orang	
Fungsional		-	Orang	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	15	Orang
	Tenaga kontrak	50	Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	2	Orang
	Sarjana (S1)	7	Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	-	Orang



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

	Sarjana muda/Diploma II (D2)	- Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	- Orang
	SLTA	4 Orang
	SLTP	- Orang
	SD	2 Orang
Pangkat dan Golongan	Golongan I	2 Orang
	Golongan II	3 Orang
	Golongan III	6 Orang
	Golongan IV	4 Orang
Pejabat Struktural dan Fungsional	Struktural Eselon IIb	1 Orang
	Struktural Eselon IIIa	1 Orang
	Struktural Eselon IIIb	2 Orang
	Struktural Eselon IVa	6 Orang
	Fungsional	- Orang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	2 Orang
	Tenaga kontrak	3 Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	- Orang
	Sarjana (S1)	2 Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	1 Orang
	SLTA	2 Orang
	SLTP	- Orang
	SD	- Orang
Pangkat dan Golongan	Golongan I	- Orang
	Golongan II	1 Orang
	Golongan III	1 Orang
Pejabat Struktural dan Fungsional	Struktural Eselon IVa	1 Orang
	Fungsional	- Orang

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2019

5. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Kegiatan pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai hambatan tidak tersedianya panti rehabilitasi untuk Gelandangan pengemis, orang gila dan Pekerja Seks Komersial.



2. Jumlah SDM Satpol PP tidak sebandingnya dengan permasalahan di lapangan dan luasnya jangkauan wilayah pelaksanaan tugas.
3. Tidak sebandingnya antara sarana prasarana yang tersedia dengan beban pekerjaan.
4. Untuk Kegiatan Sinergitas Penegakkan Perda pada sub kegiatan Penertiban Pasar Tumpah, PKL Cenderung kembali ke tempat yang dilarang.
5. Peralatan dan logistik untuk ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada BPBD yang cukup banyak membutuhkan tempat yang layak, namun tempat atau gudang yang tersedia masih belum memenuhi standar
6. Belum tertibnya administrasi dan manajemen logistik, sehingga stok opname kurang *up to date*.
7. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai untuk pelaksanaan tupoksi
8. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi
9. Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal
10. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi.
11. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum maksimal
12. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan.

B. Solusi

Dari masalah-masalah tersebut diatas, sebagai pemecahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk sementara Gepeng Orgil, PSK dan anak Punk yang terjaring di data dan diberipembinaan di kantor Satpol PP kemudian langkah berikutnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan lebih lanjut, diharapkan ada panti yang dapat



- menampung keberadaan mereka serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Harus terus dilaksanakan Pembinaan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja selain pembinaan rutin yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini sebaiknya dibuat dalam sebuah program yang baku untuk setiap tahunnya, dikemas dalam kegiatan Pembekalan Pengetahuan dan Peningkatan keterampilan, sehingga kualitas SDM Satpol PP dapat diandalkan, terutama pelayanan terhadap masyarakat dan kesiapan dalam pengendalian gangguan. Serta ditempatkannya anggota Satpol PP untuk membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di setiap wilayah kecamatan sekaligus sebagai distribusi pengendalian dan pemantauan apabila terjadi gangguan serta dengan cara meningkatkan koordinasi dengan Kasi Trantib tiap-tiap kecamatan;
 3. Peningkatan pemeliharaan secara rutin terhadap Sarana dan Prasarana dan Optimalisasi fungsi Sarana yang ada;
 4. Diperlukan tindak lanjut penertiban yang berkesinambungan dengan dukungan anggaran yang memadai, serta diperlukan relokasi untuk PKL dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.
 5. Penganggaran rehabilitasi gudang supaya layak penggunaannya untuk menyimpan peralatan dan logistik
 6. Perlu diadakan pelatihan dan pembinaan manajemen gudang dan logistik.
 7. Dengan keterbatasan Sumber daya serta penempatan Pegawai Bakesbangpol yang tidak sesuai maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai langkah strategis Yakni dengan melibatkan Unsur-unsur pembantu kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Halnya FKDM, FKUB, FPK serta Ormas dan LSM.
 8. Dengan belum optimalnya pelatihan yang substantif maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan Bimtek terkait system Informasi yang termanajemen dengan baik seperti Halnya Bimtek Intelijen dengan melibatkan unsur dan jajarannya.



9. Dengan perubahan Gaya Hidup Masyarakat saat ini dengan pengaruh perkembangan Teknologi maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai rencana bekerja sama dengan Unsur terkait dalam Akses kemajuan teknologi, informatika, dan komunikasi sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai budaya lokal serta menggiring demokratisasi di Masyarakat sehingga memunculkan Jati diri daerah tertanam di jiwa masyarakat, serta terus, meningkatkan nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini, media sangat berperan besar dalam proses sosialisasi kepada masyarakat.
10. Dengan Minimnya anggaran membawa dampak tersendiri dalam Organisasi, Hal ini dapat diatasi dengan sering berkoordinasinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dengan unsur terkait dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di Wilayah
11. Dengan Tidak konsistennya perundang-undangan serta tumpang tindihnya peraturan pemerintah maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan unsur terkait seperti Halnya Bagian Hukum Setda Lumajang dalam mewujudkan perumusan-perumusan keputusan Bupati yang akan dibuat.

G. URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti
- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	
			%	Tahun
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2019
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2019
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	2019
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	2019
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	2019

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2019
			%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1,94
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	15,3
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	7,74
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100



4. Dukungan Personil

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	22 Orang
	Tenaga kontrak	32 Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	1 Orang
	Sarjana (S1)	15 Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	1 Orang
	Sarjana muda/Diploma II (D2)	- Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	- Orang
	SLTA	5 Orang
	SLTP	- Orang
Pangkat dan Golongan	SD	- Orang
	Golongan I	- Orang
	Golongan II	1 Orang
	Golongan III	11 Orang
Pejabat Struktural dan Fungsional	Golongan IV	3 Orang
	Struktural Eselon IIa	- Orang
	Struktural Eselon IIb	- Orang
	Struktural Eselon IIIa	1 Orang
	Struktural Eselon IIIb	2 Orang
	Struktural Eselon IVa	7 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2019

5. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Di Dinas Sosial belum memiliki jumlah karyawan yang memadai untuk menangani sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lumajang.
2. Belum berjalannya rumah AMAN atau Rumah Singgah bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berlokasi di SDN Banjarwaru.



3. Masih banyak Pekerja Sosial Masyarakat dan unsur PSKS yang belum memiliki skill dalam case work/pekerjaan sosial sehingga belum optimal dalam penanganan PMKS di kecamatan.
4. Kurang memadainya gedung PKH yang berlokasi di Dinas Sosial.
5. Tidak adanya mobil rescue yang khusus untuk menangani PMKS. Sementara ini hanya terdapat mobil rescue untuk penanganan bencana alam.

B. Solusi

1. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan kinerja jumlah karyawan yang ada.
2. Solusinya adalah dengan segera mengoperasikan dan mengoptimalkan rumah aman yang baru agar dapat memfasilitasi segala kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Solusinya dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan dasar ataupun lanjutan bagi pekerja sosial masyarakat ataupun unsur Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.
4. Solusinya adalah dengan melakukan renovasi gedung PKH agar dapat memaksimalkan kinerja pegawai dan dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
5. Solusinya perlu dilakukan pengadaan tambahan mobil rescue untuk menangani PMKS penyandang disabilitas dan gangguan jiwa agar dapat memberikan penanganan dan pelayanan yang lebih optimal terhadap PMKS.



BAB III

HASIL EKPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. HASIL EKPPD TAHUN 2019

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 dilaksanakan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.120.04/3545/SJ Tanggal 08 Mei 2019 tentang Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018.

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Penilaian indeks capaian kinerja terhadap Tataran pengambil kebijakan, yakni Kepala Daerah dan DPRD yang penilaiannya dilakukan pada Tataran pelaksana Kebijakan Daerah, yakni kinerja perangkat daerah. Tataran pengambil kebijakan terdiri dari 13 aspek dengan 43 indikator kinerja kunci (IKK). Penilaian pada tataran pengambil kebijakan mendapatkan 3,6450 atau dengan kategori prestasi sangat tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH IKK	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	34	79,07
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	2	4,65
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang	6	13,95
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah	1	2,33
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0,00
Jumlah	43	100,00

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

Tataran pelaksana kebijakan daerah terdiri dari aspek administrasi umum dan urusan pemerintahan. Penilaian pada tataran pelaksana kebijakan daerah mendapatkan skor 3,1233 atau dengan kategori prestasi tinggi dengan uraian sebagai berikut :

a) Aspek Administrasi Umum

Aspek administrasi umum terdiri dari 8 aspek dengan 21 indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencakup 23 Urusan wajib dan 6 urusan pilihan dengan



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

jumlah IKK sebanyak 630. Penilaian pada aspek umum mendapatkan skor 3,0312 atau dengan kategori prestasi Tinggi dengan Rincian sebagai berikut :

1) Skor dan Prestasi per Aspek

NO	URAIAN	SKOR	PRESTASI
1	Kebijakan teknis penyelenggaraan	2,9265	T
2	Ketaatan terhadap peraturan / Undang-undang	3,5294	ST
3	Penataan Kelembagaan	2,5735	T
4	Pengelolaan Kepegawaian	3,1882	ST
5	Perencanaan pembangunan	3,5294	ST
6	Pengelolaan keuangan	2,0912	T
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,5294	ST
8	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat	3,2000	ST

2) Skor dan Prestasi per IKK

URAIAN	JUMLAH	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	470	74,60
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	24	3,81
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang	25	3,97
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah	111	17,62
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena bukan urusan pilihan	0	0
Jumlah	630	100,00

3) Skor dan prestasi per Urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

- Skor tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada urusan : Sosial yaitu sebesar 3,8095.
- Skor terendah dengan prestasi Rendah terdapat pada urusan Transmigrasi yaitu sebesar 2,9524.

b) Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan terdiri dari 23 Urusan Wajib, 6 urusan Pilihan dan fungsi penunjang Pemerintahan Umum



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Penilaian terhadap urusan pemerintahan mendapatkan skor 3,1847 atau mendapat kategori prestasi tinggi dengan uraian sebagai berikut :

1) Urusan Wajib dan Fungsi Penunjang

Usuran wajib dan Fungsi Penunjang secara keseluruhan memperoleh skor 3,1371 dengan kategori prestasi Sangat Tinggi. Hasil evaluasi atas 23 urusan wajib sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH	%
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	11	45,82
IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	10	41,67
IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang	1	4,17
IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah	1	4,17
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0
FP yang memperoleh kategori sangat tinggi	1	4,17
Jumlah	24	100,00

Skor dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada 4 (empat) urusan dengan nilai skor tertinggi yaitu 4,0000 ada pada urusan : penanaman Modal, ketenagakerjaan, Perhubungan, dan statistik
Skor dengan prestasi Rendah terdapat pada 1 (satu) urusan dengan nilai skor terendah 1,0000 ada pada urusan kepemudaan dan olahraga.

Dari 23 urusan wajib terdapat 6 (enam) urusan wajib yang kinerjanya merupakan pelayanan dasar oleh pemerintah kabupaten/kota, hasil capaian kinerja 6 urusan wajib tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	SKOR	PRESTASI
1	Pendidikan	3,4000	ST
2	Kesehatan	3,1250	ST
3	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	2,6000	T
4	Perumahan Rakyat dan Permukiman	3,6663	ST
5	Sosial	3,6663	ST
6	Trantibum dan Linmas	2,0000	S



2) Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) urusan dan mendapatkan skor 3,3750 dengan kategori prestasi Tinggi. Hasil evaluasi atas 6 urusan pilihan sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH
UP yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi	4
UP yang memperoleh kategori prestasi Tinggi	2
UP yang memperoleh kategori prestasi Sedang	0
UP yang memperoleh kategori prestasi Rendah	0
UP yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0
Jumlah	6

Skor tertinggi sebesar 4,0000 dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada 1 (satu) urusan yaitu Kelautan dan Perikanan dan Transmigrasi
Skor terendah sebesar 2,5000 dengan prestasi sedang terdapat pada urusan Pariwisata

3. Indeks Kesesuaian Materi

Penilaian Indeks Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil penilaian mendapatkan skor 4,0000

4. Kesimpulan EKPPD Kabupaten Lumajang

Hasil EKPPD di tingkat Provinsi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang mendapatkan peringkat sementara dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke 21 (dua puluh satu) dari 38 Kabupaten/Kota dengan skor 3,3033 atau dengan **kategori prestasi Sangat Tinggi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2018**

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



Sumber : <http://www.memotimurlumajang.id/2019>

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2019, realisasi opini BPK terhadap LKPD masih belum dapat disajikan, karena opini BPK terhadap LKPD biasanya terbit pada bulan Mei tahun anggaran berikutnya. Meskipun demikian, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang atas indikator kinerja opini BPK terhadap LKPD tahun 2018 yang diterima di tahun 2019 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini memotivasi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk dapat mempertahankannya untuk LKPD tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, maka di tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan salah satu dari 35 Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang memperoleh opini WTP dari BPK. Di Jawa Timur



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

masih terdapat 3 Kabupaten / Kota yang tidak memperoleh opini WTP dari BPK, yakni Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Sistem Informasi Penyusunan APBD yang belum optimal ;
2. Mengoptimalkan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dalam rangka penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang belum optimal ;
3. Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah ;
4. Pemenuhan Persyaratan Administrasi Dana Transfer tepat waktu.



BAB IV

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Dalam hal penyusunan APBD tahun anggaran 2019 senantiasa menganut prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah agar dapat terjaga kesinambungan dan keterpaduan program-program yang telah direncanakan. Realisasi APBD Tahun anggaran 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

1.	Pendapatan	:	2.186.590.043.457,50
2.	Belanja	:	2.229.225.876.402,01
	Surplus/Defisit	:	42.635.832.944,51
3.	Pembiayaan	:	
	a. Pembiayaan Penerimaan	:	130.847.409.582,33
	b. Pembiayaan Pengeluaran	:	10.700.500.000,00
	Pembiayaan Netto	:	120.146.909.582,33

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang tahun 2019

*) Sebelum audit BPK, data per tgl 31 desember 2019

I. PENDAPATAN

Mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 bahwa target Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.52.087.022.337,60 dan terealisasi sebesar Rp. 2.186.590.043.458. Pencapaian target dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari target Rp. 316.538.321.171,60 dapat terealisasi sebesar Rp. 295.363.602.550,78 atau 93,31 % kurang Rp. 21.174.718.620,82 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Dari 10 (sepuluh) sektor objek Pajak Daerah, yang ditangani langsung oleh BPKD Kabupaten Lumajang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran,



Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara global dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 101.550.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 74.232.832.052.00 atau 73,10 persen kurang Rp. 27.317.167.948.00. secara umum realisasi penerimaan kurang dari target yang telah ditetapkan.

2. Retribusi Daerah

a) Retribusi Jasa Umum

- Dinas Kesehatan

Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan target sebesar Rp. 29.938.894.130,00 dan terealisasi sebesar Rp. 35.946.212.655,93 atau 120,07 %, secara umum realisasi naik dari target yang telah ditetapkan.

- Dinas Lingkungan Hidup

Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan target sebesar Rp. 865.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 866.150.000,00 atau 100,13 selisih Rp. 1.150.000,00, secara umum realisasi naik dari target yang telah ditetapkan.

- Dinas Komunikasi dan Informasi

Retribusi Jasa Umum yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan target sebesar Rp.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% selisih (400.000.000,00), secara umum kurang dari target yang telah ditetapkan.

- Dinas Perhubungan

Retribusi Jasa Umum yang ditangani Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang meliputi :

- a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari target Rp. 5.110.735.500,00 terealisasi sebesar Rp. 5.102.365.500,00 kurang Rp. (8.370.000,00).



b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari target Rp. 1.500.000.000,00 terealisasi Rp. atau 1.363.955.000,00 lebih Rp. (136.045.000,00) secara umum kurang dari target yang telah ditetapkan.

- Dinas Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar yang ditangani oleh Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.863.500.102,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.833.865.581,25 kurang Rp. (29.634.520,75).

- Dinas Perdagangan

Retribusi pelayanan tera/tera ulang yang ditangani oleh Dinas Perdagangan dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 144.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 161.382.000,00 lebih dari Rp. 17.382.000,00, secara umum realisasi naik dari target yang telah ditetapkan.

b) Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bagian Umum yang didalamnya terdapat beberapa jenis Retribusi seperti :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi terminal
3. Retribusi tempat khusus parkir
4. Retribusi rumah potong hewan
5. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

dengan target yang ditetapkan Rp. 4.296.008.000,00 dengan realisasi Rp. 4.860.113.381,00 dengan ini melebihi target yaitu Rp. 564.105.381,00.

c) Retribusi Jasa Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu yang dipungut secara umum telah kurang dari yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.084.550.000,00 dari target sebesar Rp. 2.046.210.470,00 atau kurang Rp 1.038.339.530,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditangani Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dari



target sebesar Rp. 5.812.735.197,60 terealisasi sebesar Rp. 4.968.766.089,07 kurang Rp. 843.969.108,53. Hal tersebut tergantung pada laba yang diterima, serta besarnya saham yang ditanam Pemerintah Kabupaten Lumajang.

4. Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 Target Rp. 155.702.323.242,00 Terealisasi Rp. 157.964.559.821,53 lebih Rp. 2.262.236.579,53.

B. Dana Perimbangan

Dari Target Rp. 1.465.258.069.503,00 dapat tercapai sebesar Rp. 1.409.112.910.571,00 atau kurang Rp. 56.145.158.932,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Ditargetkan sebesar Rp. 134.674.557.041,00 data direalisasikan sebesar Rp. 95.271.035.965,00 kurang dari target Rp. 39.403.521.076,00.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum dari target Rp. 1.003.092.909.000,00 realisasi dari Pemerintah sebesar Rp. 1.003.092.909.000,00 atau 100 persen sesuai dengan realisasi dari Pemerintah.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dengan target Rp. 327.490.603.462,00 dengan realisasi Rp. 310.748.965.606,00 kurang Rp. 16.741.637.856,00.
Dana Alokasi Khusus terdiri dari :
 1. DAK Fisik Reguler
DAK Fisik Reguler terdiri : bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, Bidang Perumahan dan pemukiman, bidang Pertanian, bidang pariwisata
 2. DAK Fisik Penugasan
DAK Fisik Penugasan terdiri : batuan operasional penyelenggaraan PAUD, Tunjangan profesi Guru, tambahan penghasilan Guru, tunjangan Khusus Guru, Bantuan operasional Kesehatan dan KB, Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, pelayanan administrasi kependudukan.
 3. DAK Non Fisik
DAK Non Fisik terdiri dari DAK Non Fisik bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, DAK Non Fisik tunjangan profesi guru, DAK Non Fisik tambahan penghasilan guru, DAK Non Fisik bantuan operasional kesehatan



dantuan operasional KB, DAK Non Fisik pelayanan administrasi kependudukan.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 470.290.631.663,00 dan terealisasi sebesar Rp. 482.113.530.347,92 lebih Rp. 11.822.898.684,92 terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah yang didalamnya dari Pemerintah Pusat dan Dana Bos;
2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya bersumber dari beberapa Bagi hasil yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok;
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus bersumber dari Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID);
4. Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari:
 - a. Bantuan Keuangan Peningkatan Pendidikan;
 - b. Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bantuan Keuangan Untuk Bantuan keuangan peringatan hari jadi Propinsi Jawa Timur;
 - d. Bantuan Keuangan Untuk program JALIN MATRA.
5. Sumbangan Pihak Ketiga;
6. Pendapatan Lainnya.

D. Permasalahan Pendapatan Daerah

Secara umum permasalahan pendapatan yang terjadi di daerah adalah :

- a) Belum lengkapnya data base tentang pajak dan retribusi daerah;
- b) Kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal:
 - Tidak tertibnya penggunaan benda berharga dari SKPD Penghasil dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk memungut retribusi daerah;
 - Terlambatnya cetak benda berharga sangat berpengaruh terhadap pemungutan retribusi daerah, sehingga berpengaruh terhadap kurang tertibnya administrasi.
- c) Masih lemahnya pelaksanaan pengawasan pemungutan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi (Penegak Perda);



- d) Kurangnya koordinasi Internal dengan unit kerja yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah :
 - Belum maksimalnya pengurusan IMB yang dilimpahkan dari dinas PU ke kecamatan.
- e) Belum optimalnya tingkat pengendalian (belum terbangunnya sistem on line yang terintegrasi antara SKPD Penghasil dengan DPMPST selaku penerbit ijin;
- f) Keterbatasan Kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi daerah dalam bidang pekerjaannya.

E. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Penegakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Pembentukan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Dan Retribusi untuk meningkatkan fungsi koordinasi;
3. Sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi secara berkelanjutan;
4. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
5. Peningkatan sarana dan prasarana, seperti meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah.

II. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Salah satu bagian APBD adalah belanja daerah. Belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa belanja menurut kelompok belanja dapat dibedakan menjadi :

Belanja tidak langsung

A. Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari :

- a. Belanja pegawai
- b. Bunga
- c. Subsidi



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

- d. Hibah
- e. Bantuan social
- f. Belanja bagi hasil
- g. Bantuan keuangan, dan
- h. Belanja tidak terduga.

B. Belanja Langsung

Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

Pada pos belanja langsung telah dapat direalisasikan dengan baik. Dan realisasinya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh SKPD.

Demikian pula mengenai komposisi anggaran pada dasarnya telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang, meskipun terdapat perbedaan dengan estimasi alokasi anggaran yang tertuang dalam RPJMD Kab. Lumajang Tahun 2015-2019 yang disebabkan karena kondisi ekonomi makro tidak sesuai dengan prediksi awal

Adapun realisasi Belanja Daerah menurut kelompok belanja adalah sebagai berikut:

Realisasi Penyerapan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	771.056.447.420,87	744.994.176.940,50	96,62
2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Hibah	154.697.900.000,00	146.468.234.605,00	94,68
4.	Belanja Bantuan Sosial	62.557.282.933,00	54.585.459.459,00	87,26
5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota/Pe merintah Desa	11.030.665.753,00	7.098.522.081,00	64,35
6.	Belanja Bantuan Keuangan	380.462.547.396,00	379.218.582.228,00	99,67
7.	Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	1.608.071.300,00	64,32
Jumlah		1,294,123,264,438.76	1,238,582,446,386.00	95,71

Sumber data : BPKD Kab. Lumajang

*) Sebelum audit BPK



**Realisasi Penyerapan Belanja Langsung Menurut Jenis Belanja Tahun
Anggaran 2019**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	4.367.331.400,00	4.157.400.750,00	95,19
2.	Belanja Barang dan Jasa	65.841.108.753,00	60.027.955.521,70	91,17
3.	Belanja Modal	3.637.500,00	3.000.000,00	82,47
Jumlah		70.212.077.653,00	64.188.356.271,70	89,61

Sumber data : BPKD Kab. Lumajang

*)Sebelum audit BPK

C. Permasalahan Belanja Daerah

Secara umum permasalahan belanja yang terjadi di daerah adalah

- Realisasi belanja SKPD tidak sesuai target;
- Penyerapan realisasi belanja tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan.

D. Solusi

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Evaluasi secara rutin penyerapan anggaran oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).

III. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

Realisasi Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Penerimaan Daerah adalah sebesar Rp. 141.547.909.582,33 sedangkan yang bersumber dari Pengeluaran Daerah sebesar Rp. 10.700.500.000,00 Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi sumber pembiayaan adalah sebagai berikut :

a) Sumber Penerimaan Daerah

- Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sumber Penerimaan Daerah hanya diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun lalu sebesar Rp. 141.024.677.582,33
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Masyarakat sebesar Rp. 523.232.000,00

b) Sumber Pengeluaran Daerah

Untuk sasaran pengeluaran yang terjadi pada pembiayaan, pada perhitungan APBD tahun anggaran 2019 Adapun realisasi pengeluaran bersumber pada penyertaan modal (Investasi) Pemerintahan daerah sebesar Rp. 8.599.000.000,00 tersebut terdiri :



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Selisih
	PEMBIAYAAN	128.524.677.582,33	130.847.409.582,33	2.322.732.000,00
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	142.024.677.582,33	141.547.909.582,33	(476.768.000,00)
	PENGUNAAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	141.024.677.582,33	141.024.677.582,33	0,00
	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	1.000.000.000,00	523.232.000,00	(476.768.000,00)
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.500.000.000,00	10.700.500.000,00	(2.799.500.000,00)
	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	10.800.000.000,00	8.599.000.000,00	(2.201.000.000,00)

Sumber data : BPKD Kab. Lumajang Tahun 2019

*) Sebelum audit BPK,

c) Permasalahan pembiayaan

Secara umum permasalahan pembiayaan yang terjadi di daerah adalah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan guna menutup devisit anggaran. Apabila SiLPA tahun lalu tidak dapat menutup devisit yang terjadi, maka daerah dapat melakukan pencairan dana cadangan, menjual kekayaan daerah yang dipisahkan maupun melakukan pinjaman daerah. Di Kabupaten Lumajang, defisit yang terjadi dapat ditutup melalui SiLPA tahun lalu, sehingga secara garis besar Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak mempunyai permasalahan dalam menentukan sumber pembiayaan daerah.



BAB V
INOVASI DAERAH

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Regulasi ini menjadi pintu bagi daerah untuk melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi.

Ada tiga kategori inovasi, yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Sementara Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

Daftar Inventarisasi Judul Program Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang pada Tahun 2019

NO.	PELAKSANA	JUDUL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
1	2	3
1	KASI YANMUM KECAMATAN PRONOJIWO	Melakukan pengiriman data administrasi Kependudukan meliputi KK dan e-KTP secara kolektif ke Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang setiap 2 kali dalam 1 minggu
2	KASI YANMUM KECAMATAN PRONOJIWO DAN TIM DARI DISPENDUK CAPIL KABUPATEN LUMAJANG	Melakukan jemput bola akte kelahiran bagi anak yang belum memiliki akte kelahiran bekerjasama dengan Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Layanan Publik Pojok OSS Center dan OSS Mobile



4	TIM KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (KKO) POSYANDU GERBANGMAS SIAGA KELURAHAN JOGOTRUNAN	SANTIK MUKA (pemerikSAaN jentIK nyaMUK berKAla) dengan Kartu dan Kendali Kamling DBD per RT - Tahun 2016
5	POSBİYANDU KESWA ENGGAL SARAS KELURAHAN JOGOTRUNAN	PUJI BERGAS (Pulih Jiwa BERsama keluarGA dan mediS) untuk Pelayanan ODGJ - Tahun 2017
6	TIM PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN JOGOTRUNAN	TANTRI DEWA (TANpa anTRI Dengan WA) Pengiriman Syarat Yanblik lewat WA di luar jam kerja - Tahun 2018
7	DINAS KETAHANAN PANGAN	Si- Gempal (Aksi Gerakan Kembali ke Pangan Lokal)
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG	Aplikasi E-Simpel, Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Elektronik yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang untuk mengatur mekanisme pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha/kegiatan, perizinan, lamaran kerja dan peran serta masyarakat melalui penyampaian informasi dan pelaporan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi yang dikembangkan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, percepatan dan kemudahan akses pelayanan guna mendukung upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
9	BANK SAMPAH INDUK KALPATARU	Bank Sampah Induk Kalpataru
10	KECAMATAN KLAKAH	Informasi Nama-Nama Kepala Kartu Keluarga yang sudah jadi / ready di Kecamatan Klakah Melalui Media Sosial Email dan FB PPID Kecamatan Klakah dan Surat Fisik ke setiap Desa
11	KECAMATAN KLAKAH	Informasi Nama-Nama Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) yang sudah jadi / ready di Kecamatan Klakah Melalui Media Sosial Email dan FB PPID Kecamatan Klakah dan Surat Fisik ke setiap Desa
12	TIM RCP DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LUMAJANG & TIM PATEN KECAMATAN KLAKAH	Mendirikan Kelompok Melalui media sosial Watshap untuk pencarian warga tergolong usia lanjut guna mengikuti jemput bola di tiap rumah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018

13	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. LUMAJANG	Si KEPO (Sistem Kerja Pelaporan)
14	KELURAHAN KEPUHARJO	"CUMA" (Cukup di Rumah)
15	KELURAHAN CITRODIWANGSAN	MEDIA CITRO
16	BAKESBANGPOL	SDTK (Sekali Datang Tidak Kembali)
17	BAPPEDA (BID. FISPRA)	Sistem Informasi Menejemen Tata Ruang (SIMTARU)
18	DINAS SOSIAL	SANTAN MANIS (Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin)
19	TIM INOVASI INSPEKTORAT	Pembentukan ISC (<i>Inspektorat Service Centre</i>)
20	SEKSI PELAYANAN UMUM	<i>One Person One Product</i>
21	SEKSI PEMERINTAHAN	<i>One Person One Product</i>
22	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Optimalisasi Aplikasi Whatsapp dalam pendistribusian surat
23	SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Data Terpadu Perekonomian dan Pembangunan (Data Perekbang)
24	KEC. RANDUAGUNG	GARUDA MENANG (GerAKAN tuRUUn Ke DesA MELayaNi & membaNGUn)
25	DINAS PERIKANAN	Pengembangan Budidaya Ikan Patin Berbasis Kemitraan
26	SEMUA PERSONIL KECAMATAN RANUYOSO	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa
27	SEMUA PERSONIL KECAMATAN RANUYOSO	Jemput Bola Penyelesaian Administrasi Desa
28	KECAMATAN TEMPURSARI	melaksanakan Kurir Data Administrasi Kependudukan ke Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan setiap Minggu Kali yaitu hari Selasa dan Kamis
29	KECAMATAN TEMPURSARI	Informasikan Nama-nama kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran yang sudah jadi melalui Media Sosial (Facebook KIM Warta Bahari dan Kecamatan Tempursari) dan Surat Fisik kesetiap Desa
30	KECAMATAN TEMPURSARI	melakukan pendataan bagi warga yang mengalami disabilitas untuk dilakukan kegiatan jemput bola perekaman E-KTP langsung ke yang bersangkutan bekerja sama dengan TIM RCP Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten lumajang
31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Media Center



32	KECAMATAN TEKUNG	Pelayanan melalu medsos harapan masyarakat bisa cepat menerima hasil layanan baik berupa KTP, KSK, Surat Pindah dan Surat lain.
33	KECAMATAN JATIROTO	PELAYANAN MALAM
34	PELAYANAN UMUM	Pelayanan KTP dan KK dengan cara DTD (Dor To Dor)ke Masyarakat
35	PUSKESMAS TEMPURSARI	RAN (Remaja Anti Narkoba)
36	PUSKESMAS TEMPURSARI	GAS (Gerakan Anti Seks Bebas)
37	PUSKESMAS PRONOJIWO	GEMA MALIBU (Gerakan Masyarakat Mengawal Ibu)
38	PUSKESMAS CANDIPURO	PANDEGA PINTAR (Pasang Bendera Siaga Peduli Ibu dan Tanpa Asap Rokok)
39	PUSKESMAS PENANGGAL	KUSUMA (Keluarga dan Suami Siaga)
40	PUSKESMAS PASIRIAN	SIKMAPETIK (Aksi Remaja Peduli Jentik)
41	PUSKESMAS PASIRIAN	DESI BIN DARWIS (Desa Siaga Bersama Inovasi Kelompok Sadar Wisata)
42	PUSKESMAS PASIRIAN	MALIBU (Masyarakat Peduli Gizi Buruk)
43	PUSKESMAS PASIRIAN	JARAN GOYANG (Ajak Keluarga Rajin Berolahraga dan Bergoyang)
44	PUSKESMAS BADES	GERTAK KASI (Gerakan Serentak Keluarga Siaga)
45	PUSKESMAS TEMPEH	PUTRA SANTUN (Puskesmas Tempeh Ramah Anak Sadar Dini Tumbuh Kembang)
46	PUSKESMAS GESANG	WAPIK LAN SYAHDU (Waria Peduli Kesehatan Melalui Posyandu)
47	PUSKESMAS ROGOTRUNAN	UJI BERGAS (Pulih Jiwa Bersama Keluarga dan Medis)
48	PUSKESMAS LABRUK KIDUL	GEMA BERTAMU PLUS (Gerakan Masyarakat Memberantas Nyamuk Plus)
49	PUSKESMAS TEKUNG	KESI PISS (Keluarga Siaga dengan Pendampingan Ibu Hamil Melalui SMS) GEPRUK (Gerakan Peduli Gizi Buruk)
50	PUSKESMAS KUNIR	KAGEM CINTA LAN TRESNO KANGGO KESEHATAN (Kami Gemar Cuci Tangan Terpadu dan Selaras Kanggo Kesehatan)
51	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	PERIGADIS (Pemeriksaan Gratis Dhuafa di Yosowilangun)
52	PUSKESMAS SUMBERSARI	BERKAT GEMUK (Bersama Masyarakat Grebek Nyamuk)
53	PUSKESMAS SUMBERSARI	SIAP SEJIWA (Lansia Paliatif Kesehatan Jiwa)



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018

54	PUSKESMAS JATIROTO	POLISI TB (Pos Peduli Pasien TB)
55	PUSKESMAS JATIROTO	DANGDUT ASIX (Pedagang Duta Asi X)
56	PUSKESMAS JATIROTO	KBK GULA TEBU JATIROTO
57	PUSKESMAS RANDUAGUNG	TEMAN SEJATIKU (Temukan Antar Nama Tindak Lanjuti Kunjungi)
58	PUSKESMAS RANDUAGUNG	PAGI BERSERI
59	PUSKESMAS TUNJUNG	SERULING PEMIKAT (Sehatkan Rumah dan Lingkungan dengan Pemakaian Kakus Sehat)
60	PUSKESMAS TUNJUNG	Lomba Posyandu
61	PUSKESMAS SUKODONO	GERMAS SERDADU (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Serempak dan Terpadu)
62	PUSKESMAS PADANG	GERDU TERANG (Gerakan Terpadu Pengentasan Gizi Kurang)
63	PUSKESMAS PADANG	GETAR CINTA (Gerakan Terpadu Cegah Kematian Ibu Balita)
64	PUSKESMAS PASRUJAMBE	CILUKBA PLUS (Cinta Peluk Ibu dan Bayi Plus Pendanaan)
65	PUSKESMAS SENDURO	TOSKA (Tolong Selamatkan Kami)
66	PUSKESMAS GUCIALIT	SUSI (Suami Siaga)
67	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	DASI MATJAJANG BERMOTIF PISANG (Desa Asi Kecamatan Kedungjajang Memotivasi Para Ibu Sadar Kasih Sayang)
68	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	ORASI SI MAHMUD (Orang Tua Siaga Menginspirasi Mama Muda)
69	PUSKESMAS KLAKAH	GERDU KOPIHATI (Gerakan Terpadu Komunitas Peduli Ibu Hamil Risti)
70	PUSKESMAS KLAKAH	GIGA (Gerakan Iknisasi Gratis)
71	PUSKESMAS RANUYOSO	ORASI BU SAMAN (Orang Tua dan Mertua Siaga Ibu Bersalin Aman)
72	BAPPEDA (BID. DATAISPR A)	Sistem e- Planning Musrenbang

Sumber : Bagian Organisasi Setda, Tahun 2019 data per 31 Januari




Adapun beberapa penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Lumajang atas inovasi pelayanan publik nya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PRESTASI	LEADING SEKTOR	TINGKATAN PRESTASI
1	PERAIH PENGHARGAAN PBB DI BIDANG INOVASI PELAYANAN PUBLIK (GEBRAKAN SUSI (SUAMI SIAGA))	DINAS KESEHATAN	INTERNASIONAL





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018

2	PERAIH PENGHARGAAN PBB DI BIDANG INOVASI PELAYANAN PUBLIK (BLOOD JEK SI PENYELAMAT NYAWA)	UDD PMI	INTERNASIONAL	
3	PENGANUGRAHAN PREDIKAT KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 DARI OMBUDSMAN RI	BAGIAN ORGANISASI	NASIONAL	 <p>PENGANUGRAHAN PREDIKAT KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 LUMAJANG 27 NOVEMBER 2019 DOKI HUMAS DAN PROTOKOL</p>
4	PERAIH PENGHARGAAN DI BIDANG INOVASI PELAYANAN PUBLIK GADIS AYU (GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINDUK KE POSYANDU), DALAM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KOVABLIK) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 SEBAGAI TOP 45 KOVABLIK PROV. JATIM TAHUN 2019	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROVINSI	
5	Dst			

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang Tahun 2019



BAB VI
PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 mencakup urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Dari Penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2019 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain itu, RLPPD merupakan sarana untuk masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kabupaten Lumajang kepada Menteri dalam Negeri secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019. Perkembangan Pendapatan Tahun 2019 dapat dilihat dari perbandingan antar target dan realisasi penerimaan secara keseluruhan, dimana pada anggaran tahun 2019, Pendapatan Kabupaten Lumajang ditargetkan sebesar Rp.2.252.087.022.337,60,00 terealisasi sebesar Rp.2.185.590.043.457,50 atau 97,09%. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lumajang menargetkan pendapatan dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.316.538.321.171,60 terealisasi sebesar Rp.295.363.602.538,58 atau 93,31%, dana perimbangan sebesar Rp.1.465.258.069.503 terealisasi sebesar Rp.1.409.112.910.571,00 atau 96,17%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.470.290.631.663,00 terealisasi sebesar Rp.482.113.530.347,92 atau 102,81%.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019, perkembangan belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019, jika dilihat dari target belanja daerah sebesar Rp.2.380.611.699.919,93 terealisasi sebesar



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018

Rp.2.229.225.876.402,01 atau 93,64%. Belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, pada tahun 2019 belanja tidak langsung dengan target sebesar Rp.1.382.304.843.502,87 teralisasi sebesar Rp.1.333.973.046.613,50 atau 96,50%, belanja langsung teranggarkan Rp. 998.306.856.417,06 teralisasi Rp.895.252.829.788,51 atau 89,68%. Dari keseluruhan belanja ini apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan terjadi defisit 42.635.832.944,51.

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, untuk pembiayaan penerimaan yang dimasukkan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dengan menargetkan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.142.024.677.582,33 terealisasi Rp.130.847.409.582,33 atau 101,81%, sedangkan menargetkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.13.500.000.000,00 terealisasi Rp.10.700.500.000,00 atau 79,26%.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2019 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019, hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Disamping berbagai keberhasilan yang dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Demikian penyampaian RLPPD Kabupaten Lumajang tahun 2019, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Lumajang. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua.